

TEKNOLOGI DAN BISNIS, ANCAMAN BAGI PENDIDIKAN MUSIK? (PERUBAHAN PARADIGMA INSTITUSI PENDIDIKAN MUSIK DI INDONESIA)

Oleh:

Riyan Hidayatullah
Prodi Pendidikan Tari

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
E-mail: riyanhidayat28@gmail.com

Abstrak

Pendidikan merupakan akar dari segala permasalahan bangsa, tidak terkecuali pendidikan musik. Di negara-negara Eropa, pendidikan musik menjadi landasan penting dalam membangun karakter generasi muda untuk memajukan bangsanya. Di Indonesia, pendidikan musik masih berfungsi sebagai muatan lokal saja. Artikel ini membahas mengenai pergeseran paradigma pendidikan musik, pola pikir mahasiswa dan fakta yang terjadi di lapangan seputar dunia industri musik dan pendidikan musik. Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan pendeskripsian kualitatif dan studi literatur. Data-data yang dikumpulkan dari makalah prosiding dan publikasi hasil penelitian. Tuntutan zaman saat ini menuntut seorang lulusan Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan (LPTK) memiliki kemampuan bermusik profesional, di sisi lain lulusan institusi musik murni dituntut untuk memiliki kemampuan mengajar yang baik. Hal ini lahir dikarenakan kurang maksimalnya *treasure studi* mengenai lulusan-lulusannya sendiri dan peenyusunan kurikulum yang belum bercermin dari kebutuhan lapangan. Di Indonesia, pulau Jawa masih menjadi pusat berkembangnya pendidikan musik dan industri musik. Hal ini dikarenakan belum meratanya lulusan-lulusan institusi musik pendidikan tinggi.

Kata kunci: LPTK Seni, Paradigma musik Indonesia

PENDAHULUAN

Berbicara masalah musik memang merupakan sebuah topik yang sangat terdengar dekat bagi setiap orang, selain musik sebagai pengisi kehidupan sehari-hari mereka juga memiliki makna estetis bagi setiap orang secara emosional. Saat ini, musik berkembang dengan sangat pesat, begitu pula dengan teknologi dan “pasar” musik tersebut. Kebutuhan “pasar” musik (dalam hal ini masyarakat umum) saat ini tertuju kepada sesuatu yang sangat sederhana dan normatif. Hampir seluruh selera sebagian masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah tertuju pada dangdut, kemudian media elektronik seperti televisi menyediakan kebutuhan tersebut dan terjadilah sebuah paradigma musik “kekinian” yang saat ini sedang marak hampir di seluruh stasiun televisi lokal maupun nasional.

Banyak yang berendapat bahwa tidak perlu sekolah tinggi untuk mempelajari musik. Stephanie (2003:4) menjelaskan bahwa “musik yang tidak bermakna ibarat makanan yang tidak sehat bagi tubuh. Banyak yang mendengarkan musik tanpa memilih, mereka tidak paham, atau hanya sedikit memahami dampak musik terhadap diri mereka”. Untuk dapat memahami dampak musik ditempuh lewat jalur pendidikan musik secara khusus, karena ada hal-hal terkait permasalahan psikologis, metodologi, pedagogi dan lain-lain. Efek yang timbul dari kurang atau tidak adanya pendidikan musik dalam diri seseorang salah satunya “fanatisme” dan “mendewakan” salah satu jenis musik. Setidaknya hal inilah yang saat ini aktual dan sedang terjadi di negeri kita tercinta, Indonesia.

Musik hampir selalu mengalami progres yang pasti dari tahun ke tahun. Jika satu atau dua dekade silam para orang tua sangat mengkhawatirkan anak-anaknya bergelut di bidang musik, maka saat ini ideologi itu sekaakan tergerus oleh zaman. Musik berkembang menjadi sesuatu yang elegan, trendi, dinamis dan selalu menarik untuk selalu dimunculkan keberadaannya. Sjukur (2014:106) memberikan gambaran mengenai pendidikan musik yang diterapkan dari mulai usia 6 sampai 14 tahun, seluruh anak tingkat satuan pendidikan SD mendapat pelajaran musik secara sistematis dan terpadu dengan program kurikuler. Program ini dilanjutkan hingga sekolah menengah. Musik digunakan sebagai sarana pendidikan dengan cermat untuk membentuk kepribadian, hal ini sangat bertolakbelakang dengan iklim pendidikan di Indonesia. Di Hongaria percaya bahwa pendidikan musik merupakan pondasi membentuk suatu negara, bahkan sampai mereka mengenyam pendidikan tinggi.

Dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia, ada sebuah institusi pendidikan yang mencetak produk guru musik sebagai outputnya. Institusi ini lahir dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang tersebar di seluruh Indonesia. LPTK adalah sebuah lembaga yang menyiapkan tenaga-tenaga kependidikan (profesional), yang selain menguasai keilmuan juga menguasai metode pengajaran (mendidik). Dalam dunia seni khususnya musik, peran LPTK ini masih terasa sangat dibutuhkan terutama di daerah-daerah terpencil-tertinggal yang masih perlu dilakukan pemerataan pendidikan musik. Hanya peran seorang tenaga pendidik yang mampu menjangkau wilayah ini dan dicetak oleh LPTK tentunya.

Kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan, bahwa hasil lulusan LPTK seni (khususnya seni musik) tidak hanya menjadi seorang guru seni budaya, tetapi tidak sedikit yang sangat banyak berperan sebagai praktisi seni, penghibur (*entertainer*), pengelola musik (bisnis), instruktur non-formal dan masih banyak lagi. Hal ini merupakan masalah sekaligus ancaman yang cukup serius jika tidak ditangani dengan baik dan dicari solusi untuk institusi pencetak tenaga pendidik. Oleh karena kebutuhan “pasar” (baik sekolah maupun industri musik) yang terus berkembang, hasil cetakan lembaga pendidikan seni yang awalnya

dipersiapkan untuk mejadi seorang pendidik harus bersaing secara ketat dengan institusi non-LPTK yang menawarkan jenjang karier yang cukup cemerlang.

Ini menjadi polemik tersendiri bagi calon lulusan, alumni dan LPTK-nya sendiri. Tidak sedikit LPTK yang pada akhirnya mengambil jalan dengan ikut membuka program non-kependidikan (musik murni) untuk menjawab tantangan persaingan yang semakin ketat tersebut. Para mahasiswa calon tenaga kependidikan seni (musik) ini juga dihadapkan pada permasalahan asupan materi yang diajarkan. Kurikulum LPTK seni musik khususnya dibagi menjadi 60:40 dengan asumsi mata kuliah seni sekitar 60% dan mata kuliah kependidikan sekitar 40%, hal ini tentu akan membuat materi yang diajarkan tidak begitu mendalam, terbagi antara musik dan kependidikan. Di samping itu, wacana akan diberlakukannya Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diadaptasi menjadi sebuah standar (*benchmark*) tenaga kependidikan seni (musik) semakin menambah daftar permasalahan institusi pendidikan seni di Indonesia.

Saat ini para institusi seni murni dan LPTK dihadapkan pada tantangan yang saling tarik-menarik satu sama lain. LPTK berusaha agar cetakannya terpakai dimasyarakat dengan selalu mengubah muatan kurikulum, membuka program dan departemen baru, tanpa memikirkan dampak psikologis yang dialami mahasiswanya. Di sisi lain, institusi seni murni berusaha menjawab tantangan tingginya kebutuhan tenaga kependidikan seni musik di lapangan dengan membuka program kependidikan seperti LPTK. Selanjutnya, kedua institusi ini akan kehilangan keseimbangan dan identitas yang menjadi *trademark* masing-masing institusi.

Dalam hal ini, penulis ingin mendeskripsikan a) faktor apa saja yang menyebabkan perubahan paradigma institusi pendidikan seni musik dan b) apa saja ancaman bagi dunia pendidikan seni musik di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah pendeksripsian fakta-fakta melalui studi literatur dan observasi. Selain itu, data-data mengenai permasalahan-permasalahn seni musik di Indonesia juga digunakan untuk memberikan gambaran awal akan permasalahan yang terjadi, khususnya di Indonesia. Referensi lain berupa literasi ilmiah jugaa digunakan untuk memberikan keterkaitan antara sebuah permasalahan dengan permasalahan lainnya.

PEMBAHASAN

Perubahan Paradigma

Meningkatnya Kebutuhan Masing-masing

Salah satu tuntutan yang tidak bisa dihindari oleh masing-masing instusi, baik institusi seni musik murni dan LPTK adalah kebutuhan akan lulusan yang mampu mengajar dan praktisi. Sebagai contoh kongkret, program musik televisi-

televisi yang sedang berjamur saat ini memerlukan seorang yang berkualifikasi pemusik profesional untuk acaranya. Sedangkan di sisi lain, ada banyak sekolah formal, lembaga musik non-formal (kursus) dan sanggar yang memerlukan seorang berkualifikasi pendidik atau instruktur musik. Untuk menjadi seorang pendidik, dibutuhkan kompetensi pedagogi (metode; mengajar) yang baik. Hal inilah yang membuat kedua institusi yang berbeda ini saling mengambil peran. Rumengan (2015) berpendapat bahwa.

Kenyataan secara umum di daerah-daerah (khususnya di luar pulau Jawa) *skill* tamatan Perguruan Tinggi Murni lebih tinggi dibanding tamatan dari LPTK SENI. Ada yang mengatakan tidak mengapa, LPTK SENI tetap saja dengan tradisinya yakni dalam proses belajar tetap memasukkan muatan pedagogi yang banyak akan tetapi para calon mahasiswa harus mengikuti seleksi keterampilan dan standar keterampilannya harus dinaikan agar setelah tamat mereka telah memiliki *skill* yang standar. Dalam hal ini kita mengalami permasalahan lain yakni selain kurangnya dosen LPTK di daerah yang memiliki *skill* yang memadai juga calon para mahasiswa rata-rata belum mengalami pendidikan atau pelatihan *skill* yang cukup sehingga apabila diterapkan standarisasi keterampilan ketika tes masuk, maka hampir pasti peserta yang akan diterima sangat kurang dan dapat saja tidak ada. Rata-rata LPTK SENI di daerah-daerah yang memiliki dosen trampil *skill* adalah daerah-daerah yang menerima tenaga dosen baik dari tamatan Sekolah Tinggi Seni Murni atau LPTK SENI yang telah menerapkan standar keterampilan yang mumpuni dan umumnya tamatan LPTK SENI ini adalah berasal dari LPTK SENI di pulau Jawa.

Hal serupa ditambahkan Sinaga (2015:63) bahwa "... perguruan tinggi bidang seni yang notabene mempunyai tanggung jawab dalam mencetak sarjana tenaga kependidikan seni belum mampu memaksimalkan dalam memanfaatkan potensi seni tradisi yang ada di masyarakat".

Penyetaraan dengan Internasional

Masalah selanjutnya yang juga berdampak kepada perubahan paradigma dan kualitas pendidikan seni musik di Indonesia saat ini adalah usaha-usaha untuk menyetarakan institusi di Indonesia dengan universitas-universitas di luar negeri. Hal ini merupakan tindakan yang kurang tepat, karena iklim sosial dan pendidikannya kita masih sangat jauh tertinggal.

Mencari Keuntungan yang Banyak

Hal yang saat ini menjadi lumrah namun terlalu berat untuk diakui adalah mempertebal "pundi-pundi", dalam hal ini adalah institusi atau lembaga yang bersangkutan. Para institusi seni musik murni dan LPTK saling berlomba membuka program dan departemen baru yang berakibat pada bertambahnya pemasukan (*income*) institusi tersebut. Hal yang lebih ironis lagi, proses penyaringan calon mahasiswa saat ini tergantung pada siapa yang memiliki

kemampuan finansial yang lebih tinggi. Selain memberikan ancaman terhadap kualitas perguruan tinggi tersebut, hal ini juga terkadang hanya menguntungkan finansial dari satu arah saja.

Mengurangi Keunggulan Masing-masing

Tidak ada manusia yang sempurna dan mampu menguasai berbagai bidang, begitu pula dengan sebuah institusi. Untuk dapat melahirkan tenaga kependidikan misalnya, perlu dibekali pendidikan keguruan yang baik dan sesuai porsi jenjangnya, barulah bisa dilanjutkan dengan pemantapan materi keilmuan musiknya. Di sisi lain, seorang mahasiswa calon praktisi harus mengasah kemampuannya melalui suplemen yang diberikan melalui mata kuliah yang sesuai porsi dan waktunya. Mahasiswa yang tidak memiliki cukup kemampuan untuk mendidik dan ilmu musiknya rendah akan sulit bersaing di lapangan. Contoh lain, jika kita berbicara masalah dunia industri musik Indonesia (oleh musisi), saat ini artis-artis musik dengan kualitas bermusik yang lemah dan rendah “mewakili selera pasar” (Putranto, 2010:156). Suara yang *fals* dan buruk mengisi program-program musik di televisi dan diputarkan secara *live*. Hal ini sangat menciderai institusi-institusi seni murni yang notabene sebagai produsennya “musisi”.

Ancaman Dunia Pendidikan Musik

Teknologi

Teknologi merupakan sebuah keharusan, terutama bagi seorang praktisi musik maupun pendidik musik. Ada banyak keunggulan dari seseorang yang memiliki kemampuan bermusik (*good skills*) tetapi juga memiliki penguasaan teknologi yang baik. Jika ada dua orang yang sama-sama berkemampuan musik yang baik, tentu yang akan menjadi pemenang ialah mereka yang memiliki penguasaan akan teknologi yang baik. Namun, apakah teknologi selalu memberikan dampak yang positif bagi seorang pemusik? Setiawan (2014:199) berpendapat “teknologi digital sangat berpeluang menciptakan itu dalam sistim pola-pola yaang sangat sistematis. Media sosial di internet yang bejubel jumlahnya membantu mereka untuk hal ini, seringkali perlu *narsis* dulu, kualitas belakangan”. Terkadang terasa sangat sulit untuk memahami bahwa apa yang disukai oleh masyarakat adalah musik yang juga dapat merusak generasi muda, contohnya dengan tidak adanya filter bagi anak-anak untuk dapat menyanyikan dan mengakses lagu-lagu bagi orang dewasa tersebut, hal ini tentu akan merusak tatanan pendidikan anak-anak Indonesia di masa depan.

Sementara itu, peran lembaga pendidikan dan LPTK yang mencetak para guru-guru dan pendidik musik, belum mampu menjawab tantangan tersebut, misalnya untuk membuat sebuah lagu untuk anak-anak yang sesuai. Bagaimana bisa seorang lulusan standar LPTK seni/musik yang bekal keilmuannya masih dibagi dengan kemampuan ia mendidik. Tentu hal ini tidak menjadikan mereka

mahir dibidang musik maupun di bidang kependidikan, meskipun ada, mungkin kurang dari 5% jumlahnya hampir di setiap perguruan tinggi.

Fenomena lainnya adalah, semakin malasnya para pemain musik dalam berkarya. Seorang *performer* cetakan institusi seni musik murni sudah seharusnya memiliki kualifikasi *skill* musik yang mumpuni, tetapi saat ini para musisi seakan kehilangan jati dirinya. Setiawan (2008:60) berpendapat bahwa.

Kebiasaan zaman sekarang adalah kebiasaan instan, yang cepat dipelajari dan yang cepat menghasilkan. Inilah tantangannya. Apakah kita berpihak pada proses atau hasil, seimbang atau berat sebelah? Manual dan digital akan sama derajatnya jika sama-sama dilalui dengan proses yang matang, bukan instan, dipikirkan secara seimbang bukan asal-asalan.

Pola pikir seperti ini semakin mejamur di kalangan musisi, bahkan di kalangan pendidik ini menjadi sebuah masalah jika segala sesuatu hanya didapat dengan cara yang cepat. Hakekatnya pendidikan mengajarkan nilai-nilai dan tahapan yang harus dilalui. Jika seorang pemusik (calon musisi dan pendidik) memiliki pola pikir tersebut, maka mereka tidak lagi mau berproses, latihan dengan teratur dan disiplin dalam mengatur waktu.

Bisnis

Bisnis dalam pemahaman pendidikan tentu konteksnya terkait bagaimana membuat para tenaga pendidik terpakai di masyarakat. Peran institusi pendidikan dengan masyarakat, sekolah, lembaga non-formal, dan dinas terkait harus dibangun dengan hangat, karena kita (perguruan tinggi) penjual dan mereka adalah konsumennya. Seorang pedagang tidak mungkin akan bertahan jika jumlah permintahan oleh konsumen menurun, begitu pun sebaliknya, konsumen tidak terlayani dengan baik apabila kualitas tenaga pendidiknya kurang atau jumlahnya sangat kurang di dalam suatu daerah tertentu. Plato dalam Dharsono (2007:18) mengatakan bahwa seni dengan masyarakat memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu antara LPTK maupun institusi pencetak calon seniman dan pendidik harus saling bersinergi untuk membangun sebuah daerah, khususnya di bidang musik.

Dalam konteks kehidupan yang serba penuh akses informasi dan teknologi saat ini tersimpan sebuah ancaman lain yang cukup serius yakni politik dalam dunia hiburan (televisi dan media elektronik lain). Mack (2001:96) berpendapat bahwa.

...situasi dunia modern ini sangat berbeda, sebab sebagian hasil seni, khususnya seni musik, sudah menjadi komoditi perdagangan. Bahkan secara tidak langsung, musik sudah menjadi alat untuk mempengaruhi orang, sejajar dengan kebutuhan politis, yaitu masyarakat diberi idola-idola (dan berbagai politikus secara simbolis kerjasama dengan idola itu) yang seolah-olah mengganti pemikiran kritis terhadap masalah-masalah sosial di dalam masyarakat yang terkena. Bila iklim ini semakin berkembang di dalam tubuh

masyarakat, maka para seniman yang mandiri dan kritis tidak boleh diam, melainkan “penyakit” ini harus diperbaiki olehnya (dari dalam diri sendiri).

KESIMPULAN

Peran institusi pencetak tenaga kependidikan dan institusi non kependidikan (musik murni) musik harus bersinergi dan memiliki komitmen untuk memajukan bidang keahliannya masing-masing. Sehingga tidak lagi terjadi “penghilangan jati diri” terhadap lembaga pendidikan tinggi. *Trasure study* merupakan sektor tindak lanjut pendataan lulusan yang bisa dimaksimalkan fungsinya. Dengan melakukan pendataan yang maksimal dan pemanfaatan jaringan antara alumni-alumni secara luas akan mempermudah akses LPTK dan non-LPTK untuk melakukan analisis kebutuhan dan rprogram tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Masyarakat memerlukan seorang lulusan yang memiliki kemampuan lengkap, bisa bermain musik, meneliti, menulis, dan mengajar tentunya. Hal ini harus disikapi dengan baik oleh institusi dan LPTK seluruh Indonesia agar dapat memformulasikan sebuah kurikulum yang sesuai dengan tingkat kebutuhan di lapangan dan tentu saja bermanfaat untuk individu lulusannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartika, Sony Dharsono. (2007). *Kritik Seni*. Bandung: Rekayasa Sains
- Mack, Dieter. (2001). *Pendidikan Musik Antara Harapan dan Realitas*. UPI: MSPI
- Putranto, Wendi. (2010). “*Music Biz:Manual Cerdas Menguasai Bisnis Musik*”. *Rolling Stone* (1 Desember 2015)
- Rumengan, Perry. (2015). “Pentingnya AP2SENI Sebagai Penguat Peran LPTK Seni Dalam Mengimbangi Kemajuan Global”. Makalah pada Seminar Nasional dan Workshop Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik, Bandung.
- Setiawan, Erie. (2014). *Memahami Musik dan Rupa-rupa Ilmunya*. Yogyakarta: Art Music Today
- _____ (2008). *Short Music Service*. Bandung: Prophetic freedom
- Sinaga, Syahrul Syah. (2015). Paradigma Penelitian Pendidikan Seni Musik Di Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Prosiding: *Paradigma Penelitian Pendidikan Seni*, Bandung
- Sjukur, Slamet Abdul. (2014) . *Sluma Slumun Slamet*. Yogyakarta: Art Music Today
- Stephanie, Merritt. (2003). *Simfoni Otak*. Bandung: Kaifa